



Judul : Kok Puungutannya Double-double sih!
Tanggal : Rabu, 13 Februari 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Bebani Masyarakat, Apnatel Tolak Cukai Ponsel & Pulsa **Kok Pungutannya Double-double Sih!**

PENGUSAHA telekomunikasi keberatan dengan rencana pemerintah mengenakan cukai untuk telepon selular (ponsel) dan pulsa. Alasannya, ponsel sudah dikenakan bea masuk (BM) dan pulsa sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Riad Oscha Chalik menilai, rencana kebijakan tersebut tidak relevan. Menurutnya, masyarakat paling dirugikan dengan kebijakan tersebut. Selain harga ponsel akan naik, harga pulsa juga sudah dipastikan naik.

"Kasihannya masyarakat, kena pungutan *double-double*. Karena kalau pengusaha pasti akan mem-

bebankan ongkos produksi dan biaya lain-lain ke konsumen," kata Riad kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Riad tidak terima alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut untuk membatasi impor ponsel. Menurutnya, sebagian besar kebutuhan ponsel masyarakat adalah produk impor.

Direktur Keuangan Global Teshop Januar Chandra menambahkan, kebijakan tersebut akan mempengaruhi penjualan. Sebab, cukai ponsel akan mempengaruhi harga produk.

"Saat ini kita masih mempelajari dampaknya bila kebijakan itu diterapkan. Semua tergantung jumlah cukai yang dipungut. Tapi

tentu akan mempengaruhi penjualan," ujar Januar.

Dia berharap, pemerintah bijaksana di dalam mengambil keputusan. Pemerintah harus mengukur dulu daya beli masyarakat. Januar minta pemerintah tidak tebang pilih bila ingin mengenakan cukai terhadap produk-produk ritel.

"Jangan hanya ponsel yang dikenai cukai, tetapi produk lain juga dong," imbuhnya.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) ingin mengenakan cukai telepon selular karena produk tersebut dinilai barang mewah.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pe-

ngenaan cukai bertujuan untuk mendorong produksi telepon selular di dalam negeri. Sementara pengenaan cukai pulsa, menurut Bambang, karena penggunaan pulsa masyarakat boros. Kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi konsumsi. Kajian mengenai cukai pulsa secara resmi sudah diserahkan ke DPR pada pertengahan Desember 2012.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Andi Timo Pangerang sebelumnya menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Dia ingin usulan-usulan tersebut terus dieksplorasi. Sebab, cukai hingga saat ini masih menjadi penyumbang penerimaan negara yang cukup besar. ■ HEN